



Jurnal Politeknik Caltex Riau

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir

Ilham Akbar¹, Ruhul Fitrius^{2*} dan Supriono³

¹Universitas Riau, Program Studi Akuntansi, email: iakbar625@gmail.com

²Universitas Riau, Program Studi Akuntansi, email: ruhul.fitrios@lecturer.unri.ac.id

³Universitas Riau, Program Studi Akuntansi, email: suprionobintan@gmail.com

*Korespondensi Penulis. E-mail : ruhul.fitrios@lecturer.unri.ac.id. Telp: 082388887567

Abstrak

Akuntabilitas ialah tindakan pertanggungjawaban atas temuan yang didapatkan setelah melaksanakan aktivitas tertentu. Akuntabilitas merupakan salah satu ciri-ciri dari suatu sistem pemerintahan yang baik atau good governance. Dengan adanya akuntabilitas maka good governance dapat di rasakan keberadaannya. Riset ini bermaksud guna menguji : Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa, Sistem pengendalian Internal Pemerintah, Dan Partisipasi masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Indragiri Hilir. Pengambilan sampel menerapkan teknik sampel jenuh, Sampel riset ini ialah 99 aparat desa dari 4 kecamatan yakni Kecamatan Tembilahan Hulu (4 Desa), Kecamatan Tempuling (5 Desa), Kecamatan Kempas (10 Desa), serta Kecamatan Batang Tuaka (12 Desa). Metode analisis yang diterapkan pada penelitian ini ialah structural equation modeling (SEM) serta instrumen analisis yang diterapkan ialah perangkat lunak partial least squares (PLS). Temuan riset memperlihatkan kompetensi aparat pengelola keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah serta partisipasi masyarakat, semuanya berkorelasi pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kompetensi aparat pengelola keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah serta partisipasi masyarakat maka baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: *Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*

Abstract

Accountability is an act of accountability for the results obtained after carrying out certain activities. Accountability is one of the characteristics of a system of good governance or good governance. With accountability, good governance can be felt. This study aims to examine: The Effect of Village Financial Management Apparatus Competence, Government Internal Control Systems, and Community Participation on Village Financial Management Accountability in Indragiri Hilir District. Sampling used a saturated sample technique. The sample for this study was 99 village officials from 4 sub-districts, namely Tembilahan Hulu District (4 Villages), Tempuling District (5 Villages), Kempas District (10 Villages), and Batang Tuaka District (12

Villages). The analytical method used in this research is structural equation modeling (SEM) and the analytical instrument used is partial least squares (PLS) software. The results of the study show that the competence of village financial management officials, the government's internal control system and community participation all influence the accountability of village financial management. This indicates that the better the competence of village financial management officials, the government's internal control system and community participation, the better the accountability of village financial management.

Keywords: *Competence of Village Financial Management Apparatus, Government Internal Control System, Community Participation, Village Financial Management Accountability*

1. Pendahuluan

Anggaran pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan desa yang maju, demokratis, dan mandiri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dana yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Kabupaten/ APBD Kota (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta diterapkan guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat, sebagaimana tertuang pada Pasal 60 Tahun 2014[1]. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa untuk program baru atau kebijakan yang cukup besar secara nasional. Total dana desa yang dianggarkan pemerintah selama lima (lima) tahun terakhir ialah Rp127,75 triliun, menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Nota Keuangan). BPKP mengatakan bahwa aparat pemerintah desa perlu mengambil banyak tanggung jawab karena jumlah dana yang besar, laporan, dan aspek penting pada pengelolaan keuangan desa. Pada pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas.

Salah satu ciri good governance atau sistem pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Good governance dapat dirasakan ketika ada akuntabilitas. Namun, masih banyak masalah pengelolaan keuangan di desa sebagai akibat dari pengelolaan yang tidak dapat diandalkan. permasalahan baik di tingkat pengelolaan maupun pertanggungjawaban dijelaskan oleh Kejaksaan Agung [2]. Pada tahap pengelolaan, kepala desa sendiri mengelola dana tanpa melibatkan masyarakat atau pemangku kepentingan desa lainnya. Kadang-kadang ada markup dalam tahap pemanfaatan, seperti sebagai markup untuk honorarium dan proyek yang sudah selesai tetapi tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian di tahap pertanggungjawaban seperti keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban tidak dilengkapi bukti dan dokumentasi. Selain itu, Tri Budihato Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Riau, menyatakan beberapa faktor terjadinya masalah dalam pengelolaan dana desa, Menurutnya rendahnya pengetahuan aparat desa dalam menyusun APBDes dan laporan pertanggung jawaban masih menjadi momok yang cukup menakutkan bagi mereka, untuk tahun 2018, dana desa yang di salurkan yakni Rp. 1,26 triliun, hanya mampu di serap Rp. 709 miliar saja. Hal tersebut di karenakan terlambatnya pemenuhan ketentuan persyaratan penyaluran seperti APBDes, Laporan realisasi dan capaian output. Di kabupaten Indragiri Hilir ada kasus korupsi dana desa yang mantan Pejabat Kepala Desa Panglima Raja dan Sekretaris Desa. keduanya melakukan korupsi anggaran pembangunan desa panglima raja. Berlandaskan temuan audit BPKP Kerugian negara mencapai Rp.309.589.335. Selain kasus korupsi di Desa Panglima Raja, ada juga kasus markup pembelian bahan-bahan kegiatan pembangunan fisik di Desa Tunas Jaya, yang bersumber dari anggaran dana desa dengan jumlah Rp. 78.149.850. Maka peneliti tertarik melaksanakan riset mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kompetensi ialah salah satu factor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas, Menurut Cheng, Engstrom, dan Kattelus [3], akuntabilitas pemerintah desa juga dipengaruhi oleh kompetensi aparatur pemerintah. Ini memperlihatkan pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel semakin baik. kompetensi aparaturnya. Sistem pengendalian intern pemerintah adalah

faktor berikutnya. Menurut Aikins [4], evaluasi serta peningkatan pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses tata kelola di bawah pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan. Ini memperlihatkan sistem kontrol yang lebih baik akan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat adalah faktor terakhir. Dalam Devas and Grant [5], Crook dan Sverrisson mengklaim bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas. Partisipasi dari masyarakat, yang menyalurkan segala aspirasi serta kontribusinya, pada proses pengelolaan keuangan desa akan mengarah pada akuntabilitas. Sehingga keterlibatan masyarakat yang lebih besar akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Riset ini ialah pengembangan dari riset Sarifudin Mada (2019) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo”, perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya ialah perbedaan lokasi, variabel, serta waktu penelitian. Berlandaskan penjabaran di atas maka peneliti tertarik melaksanakan riset berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir”.

2. Tinjauan Pustaka Dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Mahmudi [6] mengemukakan akuntabilitas ialah tanggung jawab agen (pemerintah) guna mengelola sumber daya serta memberi tahu prinsipal (pemberi mandat) dari setiap serta seluruh kegiatan yang melibatkan penggunaan sumber daya publik.

2.1.2. Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa

Kompetensi ialah sifat serta kemampuan kerja yang terdiri atas aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap sesuai dengan tugas dan/atau fungsi jabatannya, sebagaimana tertuang pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 7 Tahun 2013 [7].

2.1.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem pengendalian intern ialah suatu proses tindakan serta aktivitas yang berkesinambungan yang dilaksanakan oleh pimpinan serta seluruh pegawai guna menjamin tercapainya tujuan organisasi melalui aktivitas efektif serta efisien, pelaporan keuangan yang handal, perlindungan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berlandaskan Pasal 1 (Ayat 1 serta 2) Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008[8].

2.1.4. Partisipasi Masyarakat

Sujarweni (2010) mengatakan bahwa partisipasi adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap warga desa berhak untuk ikut serta pada setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk dirinya.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.1.1. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Cheng, Engstrom, dan Kattelus [3] mengemukakan akuntabilitas pemerintah desa juga dipengaruhi oleh kompetensi aparatur pemerintah. Ini memperlihatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa meningkat seiring dengan peningkatan kompetensi.

Menurut Dwi Sapartiningsih [10], Ekasari Sugiarti [11], dan Putri Aulia [12], akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh kompetensi petugas.

H1: kompetensi aparat pengelola keuangan desa berkorelasi pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

2.1.2. Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Menurut Aikins [4], evaluasi dan peningkatan proses pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola di bawah pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian yang lebih baik akan berkorelasi pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Menurut Ivan Yudianto [13], Yustika Rezkiyanti [14], dan Arif Widyatama [15], akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah.

H2: sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

2.1.3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berlandaskan pada gagasan pengelolaan desa, yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan secara partisipatif, akuntabel, tertib, dan anggaran. Partisipasi masyarakat yang menyampaikan segala aspirasi dan kontribusinya, pada proses pengelolaan keuangan desa akan mengarah pada akuntabilitas. sehingga tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan meningkat sebagai akibat dari peningkatan partisipasi masyarakat. Dalam Devas and Grant [5], Crook dan Sverrisson mengklaim bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas.

Penelitian oleh Putri Aulia [12], Siti Umaira [16], dan Dwi Sapartiningsih [10] menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berkorelasi pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

H3: partisipasi masyarakat berkorelasi pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

3. Metode Penelitian

Populasi pada riset ini ialah seluruh aparat desa yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir, Populasi Target yaitu Kecamatan Tembilahan Hulu (4 Desa), Kecamatan Tempuling (5 Desa), Kecamatan Kempas (10 Desa), dan Kecamatan Batang Tuaka (12 Desa). sampel dalam penelitian yaitu aparat desa yang mengelola keuangan desa, dengan menerapkan metode sampel jenuh. Sampel Jenuh ialah teknik penentuan sampel bila seluruh anggota populasi di jadikan sampel. Unit analisis pada riset ini ialah : Kepala desa, Sekretaris, serta Unsur Kaur. Sehingga total sampel pada riset ini ialah 99 aparat desa.

Pengukuran untuk variabel ini menerapkan instrumen pertanyaan dengan skala sikap likert dengan lima alternatif jawaban serta masing-masing diberi skor yakni: Selalu (SL:5), Sering (SR:4), Kadang-kadang (KK:3), Jarang (JR:2), Tidak pernah (TP:1).

3.1. Definisi Operasional Variabel Dan Pengukurannya

3.1.1. Variabel Dependen

Menurut Mahmudi [6], akuntabilitas adalah tanggung jawab agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya dan memberi tahu prinsipal (pemberi mandat) dari setiap dan semua kegiatan yang melibatkan penggunaan sumber daya publik.

Indikator yang diterapkan guna mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ialah: 1) Kepatuhan terhadap hukum, 2) penghindaran korupsi serta kolusi, 3)kepatuhan terhadap prosedur, 4) pelayanan publik yang responsive, 5) pelayanan publik yang cermat, 6) Adanya

pelayanan publik dengan biaya murah, 7) Alternative program yang memberikan hasil yang optimal, 8) Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat, 9) Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil, 10) Mempertimbangkan dampak di masa depan [6].

3.1.2. Variabel Independen

1. Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa

Kompetensi ialah sifat serta kemampuan kerja yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap berlandaskan tugas dan/atau fungsi jabatannya, sebagaimana tertuang pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.7 Tahun 2013 [7].

Indikator :1) Pengetahuan, 2) Keterampilan, 3) Sikap. [7]

2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem pengendalian intern ialah suatu proses tindakan serta aktivitas yang berkesinambungan yang dilaksanakan oleh pimpinan serta seluruh pegawai guna menjamin pencapaian sasaran organisasi melalui aktivitas yang efektif serta efisien, pelaporan keuangan yang handal, perlindungan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. sesuai dengan Pasal 1 (Ayat 1 serta 2) Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 [8].

Indikator :1) Lingkungan Pengendalian, 2)Penilaian Risiko, 3) Aktivitas Pengendalian, 4)Informasi serta Komunikasi, 5) Pemantauan. [8]

3. Partisipasi Masyarakat

Sujarweni (2010) mengatakan bahwa partisipasi adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap warga desa berhak untuk ikut serta pada setiap aktivitas yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk dirinya.

Indikator :1) Memberikan Masukan kepada pemerintah desa, 2) Terlibat dalam rapat paripurna, 3)Mengusulkan rencana anggaran, 4) memberikan dukungan terhadap rancangan anggaran desa, 5) Terlibat mengawasi serta melaporkan, 6) Memberikan penilaian penyelenggaraan anggaran, 7)memberikan usulan perubahan anggaran. [9]

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1. Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Variabel	N	MIN	MAX	MEAN	Std. Deviasi
Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa	93	3	5	4,378136	0,507065
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	93	3	5	4,303226	0,482998
Partisipasi Masyarakat	93	3	5	4,270353	0,54971
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	93	3	5	4,35914	0,506202

Sumber: Data Olahan WarPLS (2020)

4.2. Hasil Analisis Data

4.2.1. Model Pengukuran (outer Model)

Convergent Validity

Tabel 2 Combined Loading and Cross-Loading

	X1	X2	X3	Y	P Value
I1	(0.596)	(0.944)	(0.808)	(0.903)	<0.001
I2	(0.928)	(0.883)	(0.565)	(0.883)	<0.001
I3	(0.948)	(0.965)	(0.679)	(0.840)	<0.001
I4	(0.916)	(0.942)	(0.828)	(0.871)	<0.001
I5	(0.962)	(0.896)	(0.595)	(0.875)	<0.001
I6	(0.972)		(0.515)	(0.827)	<0.001
I7			(0.663)	(0.843)	<0.001
I8				(0.876)	<0.001
I9				(0.843)	<0.001
I10				(0.847)	<0.001

Dengan p-value < 0,05, temuan output pada tabel 2 memperlihatkan nilai loading factor untuk setiap konstruk > 0,50. Ini memperlihatkan indikator tersebut sudah memenuhi Convergent Validity.

Discriminant Validity

Tabel 3 Tabel Hasil Korelasi Variabel Laten

	X1	X2	X3	Y
X1	(0.897)	0.009	0.127	0.197
X2	0.009	(0.927)	0.521	0.173
X3	0.127	0.521	(0.674)	0.236
Y	0.197	0.173	0.236	(0.861)

Hasil output pada tabel 3 menggambarkan bahwa akar kuadrat dari AVE setiap konstruk melampaui nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya, serta nilai AVE nya melampaui 0,50, sehingga model mempunyai discriminant validity yang cukup.

Composite Reliability

Tabel 4 Composite Reliability

Variabel	Composite	Cronbach
Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa	0.960	0.952
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0.968	0.968
Partisipasi Masyarakat	0.950	0.939
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	0.966	0.966

4.2.2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Model fit and quality indices
Average path coefficient (APC)=0.222, P=0.006
Average R-squared (ARS)=0.194, P=0.013
Average adjusted R-squared (AARS)=0.166, P=0.024
Average block VIF (AVIF)=1.039, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.243, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.372, small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36
Sympson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7 , ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if ≥ 0.9 , ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7

Gambar 1 Output General SEM Analysis Result

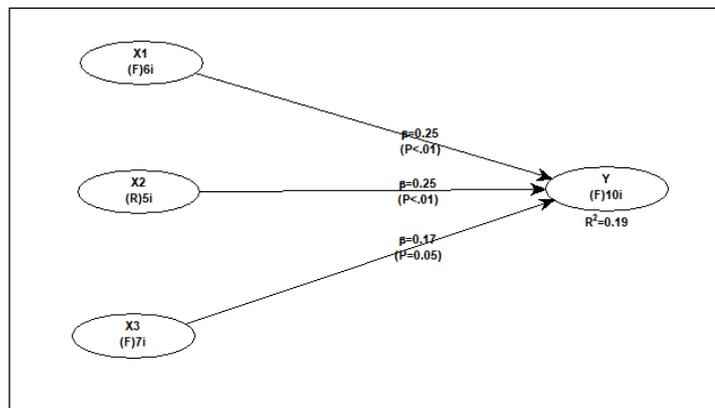
Nilai indeks ARS ialah 0,194 dengan nilai p-value 0,013, nilai indeks AARS ialah 0,166 dengan nilai p-value 0,024, serta nilai indeks APC yakni 0,222 dengan nilai p-value 0,006 seperti pada Gambar 1. APC, ARS, dan AARS semuanya telah terpenuhi, serta p-value-nya $< 0,05$. Selanjutnya model struktural (inner model) dapat diterima karena nilai AVIF adalah 1,039, yang memperlihatkan AVIF < 5

Tabel 5 R-squared Coefficients

	R-squared Coefficients
Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa	
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	
Partisipasi Masyarakat	
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	0,194

Hasil output dari tabel 5 memperlihatkan besarnya R-squared ialah 0,194, memperlihatkan 19,4 % variasi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat di jelaskan oleh variasi ketiga variable bebas yakni kompetensi aparat pengelola keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah, serta partisipasi masyarakat. Sedangkan sisanya ($100\% - 19,4\% = 81,6\%$) di jelaskan oleh sebab-sebab lain dari luar model.

4.2.3. Hasil Uji Hipotesis



Gambar 2 Model Struktural

Uji Hipotesis 1

Kompetensi aparatur pengelola keuangan desa berkorelasi pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,245 menurut model struktural. Hipotesis diterima karena signifikansi nilai p (p -value) koefisien kompetensi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa perangkat pengelolaan keuangan desa.

Situasi ini menunjukkan bagaimana kompetensi aparatur pada pengelolaan keuangan desa akan mempengaruhi seberapa akuntabel pengelolaan keuangan desa. Semakin baik kompetensi yang dimiliki maka akan baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tersebut.

Menurut Cheng, Engstrom, dan Kattelus [3], akuntabilitas pemerintah desa juga dipengaruhi oleh kompetensi pejabat pemerintah, yang relevan dengan temuan riset ini. Selain itu, hal ini sejalan dengan temuan riset Dwi Sapartiningshih [10], Ekasari Sugiarti [11], dan Putri Aulia [12] yang memperlihatkan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Uji Hipotesis 2

Gambaran pada model struktural menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah ialah 0,250. Dengan nilai p (p -value) $< 0,05$ maka sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai koefisien yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga hipotesis menjadi valid.

Keadaan ini mencontohkan sejauh mana sistem pengendalian intern suatu lembaga akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dari lembaga itu sendiri. Instrumen guna mengarahkan, memantau, serta mengevaluasi sumber daya organisasi adalah sistem pengendalian intern pemerintah. pengelolaan keuangan akan dipengaruhi oleh perbaikan sistem pengendalian.

Menurut pendapat Aikins [4], temuan penelitian mendukung gagasan bahwa pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan mengevaluasi serta meningkatkan pengendalian internal, manajemen risiko, serta prosedur tata kelola. Ini memperlihatkan sistem pengendalian yang lebih baik akan berkorelasi pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, berlandaskan riset Ivan Yudianto [13], Yustika Rezkiyanti [14], dan Arif Widyatama [15], sistem pengendalian intern pemerintah berdampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Uji Hipotesis 3

Model struktural mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh 0,169 terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hipotesis diterima karena koefisien partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa signifikan, dengan nilai p (p -value) $< 0,05$.

Keadaan ini memperlihatkan bagaimana akuntabilitas suatu lembaga dalam pengelolaan keuangan desa akan dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat yang efektif. Oleh karena itu, akuntabilitas akan tercapai jika masyarakat menyampaikan semua aspirasi dan kontribusi serta berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa. peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Crook dan Sverrisson dalam Devas and Grant [5] mengemukakan peningkatan partisipasi masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas. Temuan penelitian ini sependapat dengan pendapat tersebut. Selain itu, ini relevan dengan temuan riset Putri Aulia [12], Siti Umaira [16], dan Dwi Sapartiningshih [10] yang memperlihatkan partisipasi masyarakat berdampak terhadap desa. akuntabilitas pengelolaan keuangan.

5. Kesimpulan

Berlandaskan analisis data diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh kompetensi aparatur. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah. Demikian pula dengan temuan pengujian hipotesis ketiga yang

memperlihatkan keterlibatan masyarakat berkorelasi pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa relevan dengan hal tersebut.

Walaupun banyak variable lain yang bisa berdampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, riset ini hanya menerapkan tiga variabel bebas. Sehingga peneliti selanjutnya dapat memperluas riset ini dengan menambahkan beberapa variabel bebas.

Daftar Pustaka

- [1] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- [2] kontan.co.id, kejaksaan agung temukan enam masalah dana desa, <https://www.google.co.id/amp/amp/kontan.co.id/news/kejaksaan-agung-temukan-enam-masalah-dana-desa> [di akses pada tanggal 10 agustus 2019].
- [3] Cheng, R.H., H.E. John., C. Susan, dan K. Fall, Educating government Financial Managers: University collaboration between business, 2002
- [4] Aikins, Stephen K, an examination of government internal audit's role in improving financial performance, Journal Of Public Finance And Management, 11 (4): 306-337, 2011.
- [5] Devas, Nick., dan Grant, Ursula, Local Government Decision Making-Citizen Participation and Local Accountability: Some Evidence From Kenya and Uganda. Public Administration and Developmen. Vol.23, Page 307-306, 2003.
- [6] Mahmudi, Manajemen Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2010.
- [7] Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil
- [8] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 (Ayat1 dan 2) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- [9] Sujarweni, V. Wiratna, AkuntansiDesa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- [10] Dwi Sapartiningsih, Suharno, Analisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di wilayah Kabupaten Sragen. Jurnal akuntansi dan sistem teknologi informasi vol. 14 no. 1 maret 2018: 100-114
- [11] Ekasari Sugiarto dan Ivan yudianto, analisis faktor pada kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (survei desa-desa di wilayah kecamatan klari, kecamatan karawang timur, kecamatan majalaya dan kecamatan rengasdengklok kabupaten karawang), PROCEEDINGS ISSN- 2252-3936. 2017.
- [12] Putri Aulia, kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten 50 kota, 2018.
- [13] Ivan yudianto dan ekasari sugiarti, pengaruh penerapan sistem pengendalian instansi pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, 2018.

- [14] Yustika rezkiyanti, pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, 2019
- [15] Arif widyatama, lola novita, diarespati, pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD), berkala akuntansi dan keangan Indonesia, 2 (2017): 1-20
- [16] Siti umaira dan adnan, pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi dan akuntansi (JIMEKA), vol. 4, no. 3 (2019) hal.471-481. E-ISSN 2581-1002